

# Pola Hubungan Politik Civil Society dan Pemerintah Lokal Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram

Ayatullah Hadi, Achmad Nurmandi  
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Yogyakarta, Indonesia  
[hadi.ayatullah@yahoo.co.id](mailto:hadi.ayatullah@yahoo.co.id)

**Abstrak-** Sebagai lembaga non-pemerintah yang bersifat otonom, civil society dalam hal ini NGO berperan penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pola hubungan politik civil society dan Pemerintahan Lokal dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola hubungan politik civil society dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram. Ada empat dimensi yang mempengaruhi hubungan politik civil society dengan Pemerintahan Lokal dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik yaitu; orientasi isu, finansial, kebijakan dan organisasional. Metode penelitian menggunakan triangulasi yaitu penggabungan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif agar menghasilkan gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan penelitian adalah pola hubungan politik civil society yang diwakili oleh NGO dan Pemerintahan Lokal dalam mendorong KIP di Kota Mataram dalam dimensi orientasi isu dilakukan dengan *collaboration* yang ditandai dengan asistensi teknis pembentukan Standar Pelayanan Informasi Publik (SLIP) dan mendorong pembahasan draft Perwal tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintahan Kota Mataram. Dalam dimensi finansial, kegiatan NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram telah menunjukkan kemandirian (*autonomy*) keuangan serta kejelasan alokasi keuangan lembaga. Sementara dalam dimensi organisasional, pola hubungan civil society dan Pemerintah Lokal dalam mendorong KIP adalah *autonomy* (mandiri) dan *collaboration* (kerjasama).

**Kata kunci:** NGO, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan daerah

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan politik demokratik berjalan semenjak reformasi tahun 1998. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui sejumlah agenda; penyelenggaraan demokrasi langsung dalam pemilihan presiden dan kepala daerah, partisipasi serta kebebasan dalam berasosiasi, menyampaikan pendapat dan pikiran di depan umum, kebebasan dalam mendirikan partai politik, kebijakan desentralisasi, serta dikeluarkannya berbagai regulasi dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan demokratis dan bebas KKN. Namun, demokratisasi yang berjalan nampaknya masih prosedural, belum menyentuh kepada konsolidasi menuju demokrasi substantif.

Penguatan (nilai) demokrasi seperti: partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, ruang politik yang bebas, adanya pengawasan publik dalam pemerintahan, sebagai prasyarat berjalannya proses konsolidasi menuju

demokrasi substantif, nampaknya masih berjalan lambat, karena masih terdapatnya kendala-kendala, baik berupa lemahnya komitmen elite, kesadaran politik masyarakat yang masih rendah, belum berdayanya masyarakat sipil serta aspek teknik regulatif yang belum mampu menjawab tantangan perkembangan demokrasi ke depan.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu prakondisi sosial yang dapat mendukung kearah konsolidasi demokrasi tersebut. Menurut Jepsen dalam Ishiyama (2013)[1] salah satu prakondisi sosial penting adalah argumen tentang kultur politik, kultur warga sipil (*civil society*), dan nilai-nilai, serta dalam konteks ini ada masyarakat tertentu yang, pada level makrokultural, memiliki atribut dan tendensi untuk mendukung proyek demokrasi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pendorong tata kelola pemerintahan di daerah, baik sebagai kelompok kepentingan maupun penekan, civil society yang diwakili oleh *Non Government Organization* (NGO) masih perlu diperkuat melalui penciptaan ruang publik yang bebas dari hegemoni negara. Model hubungan politik antara kedua entitas tersebut sangat berpengaruh terhadap dinamika politik serta pembuatan kebijakan publik di daerah.

Dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adanya partisipasi warga dalam melakukan pengawasan melalui implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kota Mataram, NGO berperan aktif melalui berbagai kegiatan seperti advokasi serta *lobbying* yang kemudian direspon oleh pemerintah dengan membentuk Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintahan Kota Mataram. Artinya, diberlakukannya sejumlah kebijakan berkaitan dengan KIP merupakan hasil dari interaksi politik antara NGO dan Pemerintahan Lokal. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pola Hubungan Politik Antara *Civil Society* dan Pemerintah Lokal di Kota Mataram dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik".

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah Pola Hubungan Politik dan Pemerintah Lokal dalam mendorong KIP di Kota Mataram?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola hubungan politik civil society dan Pemerintah Lokal dalam Mendorong KIP di Kota Mataram.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan diskusi-diskusi mengenai ruang politik yang bebas bagi hidupnya

dinamika masyarakat sipil di ranah lokal. Sebagai salah satu elemen infrastruktur politik, civil society atau NGO diharapkan berkontribusi tidak hanya sebagai instrumen pengawal pemerintahan, tetapi sebagai mitra dalam memberikan gagasan-gagasan penting khususnya tentang implementasi KIP bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan bersih, akuntabel serta menciptakan pengawasan masyarakat.

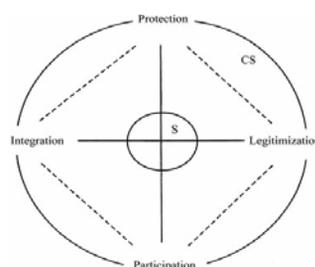
Ada sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah (1) Penelitian Sandy Jolosangoro berjudul “Peran LSM PATTIRO Semarang dalam Mendorong Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik” tahun 2011 dengan hasil penelitian bahwa peran CSO di Kota Semarang dalam mendorong KIP sangat strategis karena menjadi mitra dalam penyusunan sejumlah regulasi terkait KIP. Namun CSO mengalami kendala internal serta eksternal dalam mendorong KIP. Kendala internal, kuantitas/kualitas SDM CSO tidak memadai sehingga mengalami hambatan dalam merealisasikan visi serta program-programnya. Kendala eksternal, lemahnya kualitas SDM dan komitmen elite dalam memahami persoalan. (2) Penelitian Prasetya dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Corruption Transparan Independen (ICTI) dalam Pemberantasan Korupsi Pada Instansi Pemerintahan Kota Tanjungpinang” tahun 2015 dengan hasil penelitian bahwa Agenda NGO/CSO dalam pencegahan/pemberantasan korupsi di Kota Tanjung Pinang berperan baik meskipun masih ada praktek KKN di pemerintah daerah. NGO/CSO menyiapkan akses untuk masyarakat agar mengetahui jalannya pemerintahan, sehingga dapat bersama mengawasinya. Namun, NGO belum mampu menggerakkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi meskipun sudah memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dibutuhkan akses lain yang lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (3) Penelitian Eka Prasetya Jaya berjudul “Peran Civil society Sebagai Pressure Group Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Studi Pada Malang Corruption Watch (MCW)” Tahun 2011, hasil penelitian ini menunjukkan Intervensi CSO dalam kebijakan penganggaran di Kabupaten Malang melalui pemantauan pada pelaksanaan mekanisme formal pengaspirasian, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun DPRD.

Kerangka teoritik penelitian adalah civil society didefinisikan sebagai masyarakat sipil sebagai seluruh sektor sukarela bukan demi keuntungan, ia mengesampingkan keluarga, bisnis-bisnis dan organisasi-organisasi yang tujuan utamanya adalah memenangkan suara pemilu dan memilih para politikus (Putnam dalam Nordholt dan Schiller, 2009:436) [2].

Sementara menurut Sementara, Wiratmo (2001:19-20)[3], mengembangkan konsepsi *civil society* menjadi masyarakat adab yang diartikan sebagai tidak hanya memberikan posisi warganegara yang lebih mandiri terhadap negara, bukan hanya demokrasi yang menekankan hak-hak individual dan supremasi hukum tapi terutama menekankan pada pembenahan moral hubungan antar warga negara itu sendiri, nilai-nilai kerukunan yang menghasilkan kepedulian terhadap semua warga negara dan nasib bangsa (sikap komunitarian).

Dipertegas kembali Puspitosari (2012:46)[4], merujuk pada pendapat Tocqueville, latar belakang dari munculnya Ornop/NGO seharusnya berbasis pada ciri-ciri seperti; a) Kesukarelaan (*Voluntary*); Keswasembadaan (*self-generating*); c) Kesewadayaan (*self support*), d) Punya kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan negara, dan e); keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh negaranya.

Civil society adalah suatu masyarakat yang dipenuhi nilai-nilai keadaban (*civility*), dengan ciri-ciri: egalitarianisme, penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat secara aktif, kepatuhan terhadap norma dan hukum, toleransi, pluralisme, musyawarah dan penegakan hukum dan keadilan (Madjid, 1996:51-55)[5]. Muller (2006) [6] menggambarkan pola hubungan *civil society* dengan negara sebagai berikut:



Gambar 1.1 Pola Hubungan Civil Society dengan Negara

Gambar di atas menunjukkan bahwa lingkaran luar mewakili seluruh masyarakat sipil, dan lingkaran kecil di sekitar pusat mewakili negara dan bidang kekuasaan politik, yaitu lingkup pengendalian informasi dan pengawasan sosial. Ujung atas dari sumbu vertikal adalah pelindung atau fungsi defensif, yang merupakan analogi dari konsep "kebebasan negatif" yaitu tentang politik emansipatoris. Fungsi ini terutama berkaitan dengan ketentuan jaminan hukum, mengamankan ruang otonomi sipil, dan pembebasan dari ketidaksetaraan. Pada ujung sumbu vertikal bawah adalah fungsi partisipatif yang, sebaliknya, sesuai dengan konsep "kebebasan positif". Dimensi ini berkonsentrasi pada keseluruhan kualitas lingkungan sosial, yang menampilkan peluang untuk politik realisasi diri dan kehidupan sipil terpenuhi dan puas. Kedua nilai membentuk konten dari dinamika pergeseran dalam hubungan antara masyarakat sipil dan negara.

Bagaimana bentuk sebenarnya hubungan antara NGO dan pemerintah? James V. Ryker dalam Gafar (2006:20)[7] mengungkapkan dengan baik mengenai masalah ini. Menurutnya ada lima model hubungan antara NGO dengan pemerintah yang pernah dipraktikkan di berbagai negara.

1. *Autonomous/Benign Neglet*. Dalam konteks hubungan yang seperti ini, pemerintah tidak menganggap NGO sebagai ancaman, karena itu membiarkan NGO bekerja secara independen atau mandiri. Dengan demikian, NGO dapat menikmati kemandirian mereka dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa adanya intervensi pemerintah.

2. *Facilitation/Promotion*. Pemerintah menganggap kegiatan NGO sebagai sesuatu syarat yang bersifat komplementer. Pemerintahlah yang menyiapkan suasana yang mendukung bagi NGO untuk beroperasi. Dukungan yang bersifat organisasional diberikan pemerintah dengan memberikan pengakuan yang lebih besar atas legitimasi NGO. Sementara itu, dukungan yang berupa administratif diwujudkan dengan menciptakan forum bagi pemerintah dan NGO dalam berbagai tingkat, guna membahas secara intensif berbagai persoalan yang merupakan kepedulian bersama.

3. *Collaburation/Promotion*. Pemerintah menganggap bahwa bekerjasama dengan kalangan NGO merupakan sesuatu yang menguntungkan. Karena, dengan bekerjasama, semua potensi disatukan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk dukungan non finansial, misalnya dengan melakukan pelatihan. Sebaliknya, pemerintah menyediakan jaringan dukungan kegiatan bagi NGO. Yang terakhir, kerjasama dapat berbentuk forum bersama yang melibatkan kalangan NGO dan pemerintah, guna membahas hal-hal yang menjadi kepedulian bersama

4. *Cooptation/Absorption*. Pemerintah mencoba menjaring dan mengarahkan kegiatan NGO dengan mengatur segala aktivitas mereka. Untuk itu, kalangan NGO harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tabel berikut memaparkan empat dimensi orientasi yang dapat menjadi faktor penentu pola hubungan politik antara NGO dengan pemerintah/negara, dan strategi NGO dalam masing-masing dimensi tersebut, serta posisi pemerintah/negara ketika berhadapan dengan NGO (Gaffar, 2006)[8]

**Tabel I.1 Dimensi hubungan politik NGO dan Pemerintah**

Dimensi Ruang Politik	Strategi NGO vis-avis Pemerintah/Negara	Strategi Pemerintah/Negara vis-a vis NGO
Orientasi isu	Mempengaruhi agenda pembangunan, mengkritik dan mengajukan alternatif kebijakan	Menetapkan agenda dan prioritas pembangunan, dan memonitor alternatif apa yang dapat diterima
Finansial	Memobilisasi dukungan dana, sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah	Membantu sumber keuangan NGO, mengatur dan menyetujui penggunaannya untuk pembangunan
Organisasional	Menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan	Membantu proses administrasi NGO, mengatur kegiatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan
Kebijakan	Mempengaruhi dialog dalam pembentukan kebijakan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijakan	Membantu kebijakan, dialog, mengatur akses ke pembuatan keputusan, dan memelihara kontrol atas lingkungan pembuatan kebijakan.

Sumber: Gaffar (2006)

Tabel di atas menggambarkan tentang empat dimensi yang dapat mempengaruhi hubungan politik civil society dengan pemerintah. Dimensi orientasi isu diartikan NGO mempengaruhi agenda pembangunan, mengkritik

dan mengajukan alternatif kebijakan. Dimensi finansial menjelaskan tentang langkah-langkah NGO dalam memobilisasi dukungan dana, sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah. Dimensi kebijakan artinya dalam melaksanakan peran sebagai agen penyeimbang kekuasaan pemerintahan NGO senantiasa mempengaruhi dialog dalam pembentukan kebijakan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijakan. Sementara pada dimensi organisasional NGO berupaya menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan

## II. METODE PENELITIAN

### A. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan mix-methods atau campuran yaitu pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif atau metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian). Sehingga dari berbagai definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *mix-method* penelitian adalah penelitian yang memadukan atau mengkombinasikan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif.

### B. Pendekatan

Penelitian mengenai analisis pola hubungan civil society dan Pemerintahan Lokal dalam Mendorong KIP di Kota Mataram dilakukan dengan strategi triangulasi yaitu menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mengintegrasikan metode analisis isi (*content analysis*) kuantitatif dengan teknik wawancara mendalam. Strategi triangulasi adalah penggabungan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti.

### C. Teknik Pengumpulan data

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada seluruh ketua NGO yang terdiri dari Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi NTB), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam NU) Kota Mataram, Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Mataram dan (PD) Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram. Sementara kuisisioner akan dilakukan terhadap masing-masing NGO masing-masing 5 orang responden sehingga berjumlah 25 orang responden. Dokumentasi penelitian ini menyangkut data-data renstra NGO, AD/ART NGO, dokumen dan laporan program kerja tahunan, Peraturan Daerah dan RPJMD Pemerintahan Kota Mataram.

#### D. Analisis Data

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu: Pengumpulan data, yaitu data yang didapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum diolah oleh peneliti. Reduksi data dengan membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti. Identifikasi dan Kategori. Dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan modifikasi terhadap data dan informasi yang telah di peroleh melalui kuisioner, Wawancara dan Dokumentasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Dimensi Orientasi Isu

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP sebagai indikasi pemerintah sangat serius untuk menciptakan kelembagaan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, responsif dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Dalam dimensi orientasi isu, khususnya indikator mempengaruhi agenda pemerintahan, sejumlah strategi dilakukan dalam mengimplementasikan UU KIP di lingkup Pemerintahan Kota Mataram melalui pemberitaan media surat kabar maupun media online. Komponen yang terlibat dalam mempengaruhi agenda pemerintah dalam mengimplementasikan KIP melibatkan sejumlah NGO serta tokoh masyarakat. Strategi yang dilakukan juga beragam, seperti seminar, *workshop*, advokasi, penulisan opini dan pemberitaan Surat Kabar. Namun usaha untuk mendorong implementasi UU KIP tersebut tidak langsung mendapatkan respon pemerintah. Butuh waktu sekitar tiga tahun semenjak diberlakukannya UU KIP pemerintah baru menyiapkan infrastruktur dan regulasi keterbukaan informasi.

Tabel di bawah menggambarkan pendapat reesponden pada masing-masing NGO tentang masih minimnya respon Pemerintahan Kota Mataram tentang kewajiban melaksanakan KIP, terutama berkaitan dengan kualitas pelayanan informasi. Responden berjumlah 25 orang yang berasal dari PD Muhammadiyah Kota Mataram, PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram, Fitra NTB, Somasi NTB dan Lakpesdam NU.

**Tabel III.1**

#### **Respon Pemerintah dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terkait dengan Kualitas Pelayanan Informasi di Kota Mataram**

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral		f	%
	F	%	f	%	f	%		
PD Muhammadiyah Kota Mataram	1	4	4	16	0	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	2	8	3	12	0	0	5	20
Fitra NTB	1	4	4	16	0	0	5	20

Somasi NTB	1	4	4	16	0	0	5	20
Lakpesdam NU	3	12	2	8	0	0	5	20
Jumlah	8	32	17	68	0	0	25	100

Sumber: data diolah dari kuisioner

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden yakni 17 orang (68%) menganggap masih minimnya respon pemerintah tentang KIP, hanya 8 orang (32%) yang menganggap respon pemerintah tentang KIP sudah baik. Hambatan-hambatan yang menyebabkan masih minimnya respon pemerintah tentang KIP, disebabkan pemahaman birokrasi yang masih rendah tentang tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan berdasarkan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas. Hal tersebut terungkap melalui wawancara dengan Ketua Lakpesdam NU Kota Mataram, Yusuf Tantowi, sebagai berikut:

Saya melihat kesadaran birokrasi pemerintah tentang pentingnya keterbukaan informasi yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang masih kurang tentang KIP. Walaupun ada, tapi masih berkisar pada kelompok elite birokrasi, belum menyentuh kepada pegawai pada tingkat bawah. Maka dari itu, model serta jangkauan gerakan NGO perlu diperluas dengan berbagai stakeholder agar dapat mendorong pemerintah memperbaiki kualitas pelayanan terutama berkaitan dengan pelayanan informasi. (*Wawancara Hari Sabtu, 15 Oktober, Pukul 13.30.WIT di Kantor SOMASI NTB*).

Wawancara di atas menegaskan bahwa kesadaran pemerintah masih minim tentang KIP terutama terkait dengan kualitas pelayanan informasi. Oleh karena itu diharapkan agar NGO lebih bersinergi dengan berbagai stakeholder dalam mendorong kualitas pelayanan informasi. Gerakan mendorong KIP tidak bisa dilakukan oleh NGO sendiri namun harus melibatkan berbagai komponen lainnya agar desakan kepada pemerintah lebih kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Ciri khas gerakan NGO di Kota Mataram dalam mendorong terwujudnya KIP di pemerintahan memiliki dua sifat, yaitu secara *intern* dan *ekstern*. *Intern* berarti, NGO masuk kedalam sistem atau menekan pemerintah untuk mengimplementasikan KIP, baik melalui kegiatan asistensi teknis (*technical assistance*), advokasi, dan pengawasan. Sedangkan *ekstern*, yaitu NGO juga bergerak turun ke level masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dan membangun opini publik terhadap adanya hak memperoleh informasi publik secara terbuka.

Bentuk kegiatan yang diselenggarakan NGO Kota Mataram dalam hal ini adalah asistensi teknis penyusunan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), mendorong pemembahasan rancangan (*draft*) Perwal Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintahan Daerah Kota Mataram, hingga tindak lanjut terakhir adalah bersepakat untuk menjadikan Pemerintahan Kota Mataram sebagai proyek percontohan (*pilot project*) pelaksanaan KIP di NTB. Dampak dari kegiatan NGO tersebut adalah implementasi Perwal Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Kota Mataram. Penjelasan tentang agenda NGO dalam mempengaruhi agenda pemerintahan tersebut menegaskan adanya pola kerjasama (*collaburation*) antara civil society atau NGO dan Pemerintahan Kota Mataram dalam Mendorong KIP.

Dalam indikator menyangkut kebutuhan publik, NGO serta Pemerintahan Kota Mataram memiliki pandangan yang sama tentang KIP sebagai kebutuhan dasar publik sehingga harus diperjuangkan oleh semua pihak. Pada indikator lain yaitu indikator mempengaruhi aktivitas lembaga, NGO menunjukkan aktivitas *lobbying* dan advokasi untuk mendorong Pemerintahan Daerah agar segera membentuk Komisi Informasi dan pembentukan aturan turunan dalam menerapkan UU KIP di masing-masing SKPD. Respon Pemerintah terhadap tuntutan NGO adalah dengan membentuk Komisi Informasi dan Pemberlakuan Perwal Kota Mataram Nomor 5 tahun 2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing SKPD, badan dan UPTD.

Tabel di bawah menjelaskan tentang frekuensi pemberitaan tentang KIP berdasarkan Subyek pemberitaan.

**Tabel III.2**  
**Sajian Data Isi Berita Keterbukaan Informasi Publik Surat Kabar dan Media Online Berdasarkan Subyek Berita**

Total Topik Berita Berdasarkan Subyek Berita		
Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
Muhammadiyah	0	0
Fitra NTB	20	42
Somasi NTB	15	32
Lakpesdam NU	0	0
Pemerintahan Daerah	13	26
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah peneliti

Tabel di atas menjelaskan bahwa pemberitaan tentang KIP oleh media lokal di dominasi oleh NGO yaitu Fitra NTB dan Somasi NTB masing 42% dan 32%. Artinya, selain NGO di Kota Mataram memiliki gerakan intensif dalam mensosialisasikan KIP. Beda halnya dengan Pemerintahan Daerah dan beserta tiga NGO lainnya kurang mendominasi pemberitaan media lokal. Dengan pemberitaan yang masif tentang aktivitas NGO dalam mendorong KIP berpengaruh signifikan terhadap komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UU KIP di daerah.

**Tabel III.3**  
**Hubungan Visi-Misi Organisasi Masyarakat Sipil dengan Agenda Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram**

NGO/Ormas	Visi-Misi/Fokus Gerakan	Relevansinya dengan Isu KI
Somasi NTB	Transparansi dan Anti Korupsi	Terkait dengan keterbukaan dan anti korupsi

Fitra NTB	Tansparansi Anggaran	Terkait dengan transparansi anggaran
Lakpesdam NU Mataram	Kajian dan Pengembangan SDM NU	Terkait dengan kepentingan publik
Pemuda Muhammadiyah Mataram	Sosial Keagamaan Berbasis Gerakan Pemuda	Terkait dengan kepentingan publik
PD Muhammadiyah Mataram	Sosial dan Keagamaan	Terkait dengan kepentingan publik

Sumber: Diolah Dari Hasil Wawancara

Tabel di atas menunjukkan bahwa, Somasi NTB dan Fitra NTB memiliki visi-misi yang fokus dengan gerakan transparansi atau keterbukaan terutama berkaitan dengan anti korupsi dan transparansi anggaran, sehingga dua NGO ini sangat mendukung isu KIP di Kota Mataram. Sementara NGO dan lembaga lainnya tidak terkait langsung dengan isu KIP, namun tetap mendukung dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam mendorong KIP.

Hal ini ditegaskan melalui wawancara dengan Dwi Arie Santo, Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB, sebagai berikut”

Meskipun lembaga Somasi NTB tidak menjadikan KIP sebagai bagian dari fokus gerakan, namun visi kami jelas, yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Somasi NTB sebagai gerakan rakyat anti korupsi berjuang untuk membangun tatanan sosial yang adil secara ekonomi, demokratis secara politik dan setara secara sosial. Serta misi kami mendorong reformasi kebijakan publik dan perbaikan pelayanan publik yang berorientasi kebutuhan rakyat miskin dan perempuan. Sekalipun tidak secara tersurat ada dalam visi-misi, namun KIP juga menjadi menjadi instrumen penting dalam merealisasikan agenda perjuang kami. Sehingga kami bersama teman-teman di sini sudah punya komitmen untuk mendorong KIP di NTB umumnya, dan Kota Mataram khususnya. Tahun 2012 kami membentuk POKJA KI bersama organisasi lain beserta tokoh agama dan masyarakat. Hasilnya adalah, pada tahun 2012 NTB menjadi provinsi ke-13 yang sudah membentuk lembaga Komisi Informasi dan selanjutnya membentuk PPID di SKPD-SKPD provinsi pada tahun-tahun berikutnya. Tapi kami harus akui bahwa kesadaran masyarakat tentang KI belum baik, dan ini menjadi pekerjaan rumah kita semua agar lebih massif dalam mengkampanyekan KIP dengan cara-cara yang lebih menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat.

(Wawancara Hari Rabu, 5 Oktober, Pukul 14.00 WIT di Kantor SOMASI NTB)

Wawancara di atas menegaskan bahwa upaya NGO dalam mendorong KIP merupakan perwujudan dari gerakan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta partisipatif, sehingga NGO yang memiliki visi-misi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan isu KIP melakukan kerjasama dalam berbagai

program dan kegiatan.

Untuk mempertegas sosialisasi isu KIP oleh NGO dalam rangka mempengaruhi agenda pemerintahan, peneliti melakukan analisis pemberitaan media lokal berdasarkan topik berita. Tabel di bawah menjelaskan tentang berita tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan kategori topik berita.

**Tabel III.4**  
**Sajian Data Isi Berita Keterbukaan Informasi Publik Surat Kabar dan Media Online Berdasarkan Topik Berita**

Total Topik Berita		
Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
Sosialisasi KIP	10	20,84
Dukungan NGO dalam Mendorong KIP	22	45,84
Kinerja Pelayanan Informasi Oleh Badan Publik	7	14,58
Kinerja Komisi Informasi	9	18,74
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah peneliti

Tabel di atas menjelaskan bahwa berdasarkan topik berita KIP, kategori berita mengenai dukungan NGO mendominasi pemberitaan Lombok Post, Suara NTB, RadarLombok.co.id dan AntaraNTB.com sepanjang tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan frekuensi berita dengan kategori dukungan NGO dalam mendorong KIP sebanyak 22 kali atau 45,84% dari total berita, sementara frekuensi pemberitaan terkecil adalah kinerja pelayanan informasi oleh badan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa media lokal memiliki minat yang besar dalam memberitakan dukungan NGO dalam mendorong isu KIP di Kota Mataram.

#### B. Dimensi finansial

Pada dimensi ini dibahas tiga indikator yaitu sumber Keuangan NGO, kemandirian keuangan NGO serta alokasi keuangan NGO, ketiganya berkaitan dengan upaya mendorong KIP di Kota Mataram.

Dalam mendorong KIP, hanya dua NGO memiliki sumber keuangan yang jelas dalam mendorong KIP yaitu Fita NTB dan Somasi NTB, sementara tiga NGO lainnya tidak menunjukkan sumber keuangan yang jelas. Sementara indikator kemandirian keuangan NGO dalam mendorong KIP dapat ditelusuri dari mekanisme pengelolaan program Fitra NTB dan Somasi NTB yang menunjukkan kemandirian keuangan dalam mendorong KIP. Kemandirian keuangan tersebut terjadi karena kedua NGO tersebut tidak bergantung kepada bantuan Pemerintahan Daerah. Sumber pendanaan NGO dalam mendorong KIP didominasi oleh donor internasional.

Namun pada skala tertentu NGO berusaha untuk meminimalisir ketergantungan pada pendanaan internasional dengan senantiasa menjaga konsistensi pada kegiatan berbasis swadaya, seperti kursus

jaringan, pelatihan pengorganisasian serta pelatihan penganggaran partisipatif pada masyarakat akar rumput.

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang pendapat responden tentang kemandirian keuangan lembaga NGO dalam mendorong KIP.

**Tabel III.2**  
**Kemandirian Keuangan NGO Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik**

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral			
	f	%	f	%	f	%	f	%
PD Muhammadiyah Kota Mataram	3	12	2	8	0	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	4	16	1	4	0	0	5	20
Fitra NTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Somasi NTB	5	20	0	0	0	0	5	20
Lakpesdam NU	5	20	0	8	0	0	5	20
Jumlah	22	88	3	12	0	0	25	100

Sumber: data diolah dari kuisioner

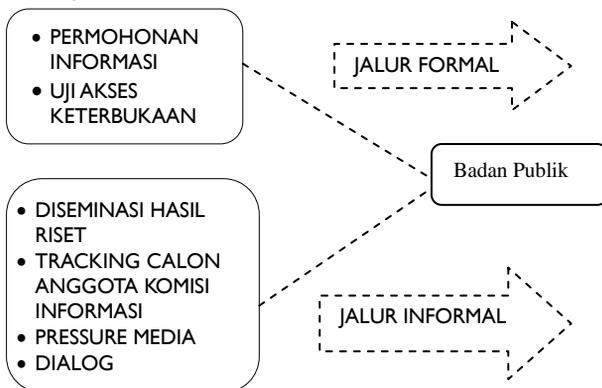
Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan pembiayaan program dan kegiatan dalam mendorong KIP dilakukan secara mandiri yaitu 22 orang (88%), menyatakan tidak yaitu 3 orang (12%). Karakteristik kemandirian keuangan NGO tersebut terjadi karena sejauh ini tidak bergantung kepada pendanaan yang bersumber dari pemerintah. Dengan demikian, NGO membuka peluang bagi hadirnya donor internasional dalam pembiayaan mendorong KIP di Kota Mataram. Sumber-sumber donor internasional tersebut yaitu, Australian AID, The Asia Foundation, TAF, dan Australian-Indonesia Program-Justice (AIPJ).

#### C. Dimensi Kebijakan

Dalam dimensi kebijakan terdiri dari dua indikator yaitu, strategi kebijakan dalam pemecahan masalah dan indikator partisipasi publik. Ada sejumlah strategi yang digunakan NGO dalam mendorong KIP yaitu:

- Strategi permohonan informasi yang telah dilakukan oleh NGO merupakan saluran formal karena telah diatur oleh UU KIP. Target informasi yang ingin didapatkan oleh NGO berupa salinan dokumen APBD, KUA-PPAS serta profil anggota DPRD. Output yang ingin dicapai dengan strategi permohonan informasi adalah mendorong akuntabilitas dan transparansi perencanaan anggaran serta maksimalisasi pengawasan publik.
- Strategi uji akses informasi juga merupakan saluran formal karena permohonan informasi yang dilakukan dengan mengawal tahapan-tahapan permohonan informasi mulai dari menunggu respon pemerintah, pengajuan keberatan oleh pemohon informasi, sampai pada tahapan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi.

- c. *Tracking* calon anggota Komisi informasi NTB merupakan saluran informal karena strategi ini tidak diatur oleh UU KIP. Badan publik yang dituju adalah DPRD yang memiliki kewenangan dalam melakukan uji kelayakan calon anggota Komisi Informasi. *Tracking* ini dilakukan terhadap rekam jejak calon anggota Komisi Informasi yang telah masuk daftar yang kemudian diuji kelayakannya oleh DPRD. Output yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah mendorong pengawasan publik terhadap proses rekrutmen calon anggota Komisi informasi.
- d. Strategi dialog atau audiensi merupakan saluran informal karena didasarkan atas prakarsa NGO sendiri dan bukan suatu yang diwajibkan oleh UU KIP. Badan publik yang dituju melalui strategi ini adalah DPRD dengan agenda mendesak penetapan/pelantikan anggota Komisi Informasi terpilih oleh gubernur dengan maksud agar pemerintah segera menunaikan perintah UU KIP dengan membentuk Komisi Informasi.
- e. Strategi diseminasi hasil riset serta *pressure media* merupakan inisiatif NGO sendiri dalam melakukan pemetaan masalah implementasi UU KIP. Penelitian ini diarahkan kepada semua badan publik mencakup gambaran tentang kondisi kesiapan badan publik dan dukungan masyarakat dalam mendukung implementasi UU KIP.



Gambar III.1 Saluran NGO Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Kota Mataram

Gambar di atas menjelaskan tentang pembagian saluran NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram yaitu saluran formal yang memang diatur dalam UU KIP dan saluran informal yaitu berdasarkan strategi otonom NGO. Sejumlah strategi yang digunakan NGO dalam mendorong KIP di atas sudah dilakukan semenjak tahun 2011 hingga akhir 2015. Strategi tersebut dilakukan bertahap sesuai dengan kebutuhan pada skala program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang disepakati oleh gabungan NGO yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja KIP) yang koordinir oleh Somasi NTB. Dalam kurun waktu tersebut respon Pemerintah provinsi NTB yaitu membentuk dan menetapkan anggota Komisi Informasi, sementara respon Pemerintahan Kota Mataram dengan memberlakukan Perwal Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan PPIID.

Pada indikator partisipasi publik dalam mendorong

KIP di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.3**  
**Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik**

ORMAS/NGO	Alternatif Jawaban						Total	
	Ya		Tidak		Netral		f	%
	f	%	F	%	f	%		
PD Muhammadiyah Kota Mataram	1	4	4	16	1	0	5	20
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram	1	4	4	20	0	0	5	20
Fitra NTB	1	4	4	0	0	0	5	20
Somasi NTB	2	8	3	0	0	0	5	20
Lakpesdam NU	1	4	4	8	0	0	5	20
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>76</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan masyarakat belum berpartisipasi dalam mendorong implemmentasi KIP yaitu 19 orang (76%), menyatakan berpartisipasi hanya 6 orang (24%).

Dalam mendorong KIP di Kota Mataram, NGO membuka ruang partisipasi masyarakat namun masih sebatas pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta organisasi-organisasi lain yang tergabung dalam POKJA KIP. Pelibatan wakil masyarakat ini tentu saja belum dapat menggambarkan pelibatan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan sangat sulit untuk menjelaskan bahwa dengan terlibatnya berbagai organisasi dan tokoh-tokoh ini sebagai bentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya KI di Kota Mataram.

Sebagai UU baru, UU KIP masih perlu disosialisasikan secara intensif agar masyarakat terlibat secara luas. Melalui sejumlah narasumber menegaskan kesadaran tentang pentingnya KIP diketahui terbatas pada kelompok menengah secara pendidikan dan ekonomi. Strategi kampanye yang masih bercorak elitis dan formal belum mampu menggalang dukungan masyarakat secara luas.

#### D. Dimensi Oraganisasional

Pada dimensi organisasional terdapat dua indikator yaitu interdependensi dan independensi. Indikator interdependensi menekankan kesalingtergantungan semua bagian organisasi, baik pada internal organisasi maupun antar organisasi. Interdependensi dalam penelitian ini menekankan kepada aspek kerjasama NGO dengan pihak luar, baik antar berbagai NGO maupun Pemerintahan KIP di Kota Mataram. Kerjasama antar lembaga tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan, karena mendorong KIP di Kota Mataram tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri tanpa keterlibatan pihak lain.

Berkaitan dengan mendorong implementasi UU KIP, maka dapat dijabarkan sejumlah stakeholder yang harus terlibat di dalamnya, yaitu NGO, Pemerintahan Kota Mataram, Komisi Informasi Publik NTB, masyarakat dan media. Masing-masing stakeholder harus bekerjasama sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing. Tetapi peran masing-masing stakeholder berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan peran dan kekuatan tersebut didasarkan pada sejauhmana masing-masing stakeholder

memiliki atribut power (kekuasaan), legitimasi dan urgensi.

Penjelasan di atas dipertegas oleh Hendriadi, Komisioner Komisi Informasi NTB Bidang Sosialisasi dan Advokasi, dalam wawancara berikut:

Dalam mendorong KIP di NTB memang banyak dikerjakan oleh NGO semenjak tahun 2011. Penggagas utama adalah lembaga Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi NTB) dengan membentuk Pokja KIP NTB yang terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan LSM-LSM. Artinya, dalam mendorong implementasi UU KIP dari tahapan pembentukan Komisi Informasi NTB sampai pembentukan aturan-aturan turunannya sudah dikerjakan bersama-sama (interdependensi) antara berbagai lembaga, seperti media, LSM, Komisi informasi, pemerintah dan masyarakat)

(Wawancara Hari Jumat, 7 Oktober Tahun 2016, Pukul 14.30.WIT di Kantor Komisi Informasi NTB, Mataram).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa kerjasama antara berbagai organisasi dalam mendorong implementasi UU KIP diperlukan agar memiliki tekanan yang lebih kuat kepada pemerintahan daerah. Implementasi UU KIP merupakan pekerjaan besar dan penuh tantangan yang tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri. Membangun Interdependensi NGO dengan sejumlah stakeholders seperti pemerintah daerah, Komisi Informasi, media serta dengan masyarakat sendiri membuktikan agenda mendorong implementasi UU KIP dilakukan dengan agar lebih sistematis dan terorganisir dengan baik.

Pada indikator independensi menegaskan NGO senantiasa menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pemerintah sebagai lembaga kekuasaan dalam hal ini dapat berperan sebagai lembaga yang membantu proses administrasi NGO, mengatur kegiatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan NGO.

Pada pembahasan sebelumnya, peneliti menjabarkan tentang kemandirian serta sumber keuangan lembaga. Pada indikator independensi ini peneliti lebih banyak menjabarkan tentang pengelolaan organisasional NGO yang meliputi upaya untuk menjaga kemandirian organisasi, baik dalam rangka menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi maupun proses pembuatan keputusan serta pelaksanaan kegiatan atau program-program organisasi.

Dalam pengelolaan lembaga NGO, penting untuk dilakukan penjabaran tentang batasan kemandirian organisasi. Sebab tidak semua yang menyangkut pengelolaan organisasi lepas dari campur tangan pemerintah. NGO dapat dengan leluasa melakukan aktualisasi diri dalam berbagai bentuk kegiatan dan program secara independen seperti kegiatan pengelolaan administrasi serta pembuatan keputusan tanpa adanya tekanan dari pemerintah. Namun, pada sisi lain, NGO tidak bisa sepenuhnya mengembangkan kegiatan organisasi tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Kemandirian kelembagaan NGO dalam mendorong

KIP di Kota Mataram dengan sejumlah kegiatan yang bersifat administrasi internal, program-program organisasi, pembentukan jaringan kerjasama dengan pihak eksternal, SOP, manajemen keuangan lembaga, dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Termasuk juga program serta kegiatan yang berkaitan dengan agenda mendorong implementasi UU KIP di Kota Mataram. Semua tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dalam mendorong implementasi UU KIP dilakukan secara independen oleh NGO. Bentuk kemandirian NGO lainnya adalah dalam pengelolaan keuangan lembaga, seperti sumber, akuntabilitas serta alokasi keuangan lembaga NGO dilakukan secara mandiri.

Selanjutnya, peneliti menjelaskan tentang sejumlah kegiatan NGO dalam mendorong implementasi UU KIP di Kota Mataram yang bersifat mandiri atau independen yang tidak dicampurtangani oleh pemerintah melalui gambar berikut:



Gambar III.2 Independensi GNO dalam Mendorong KIP

#### IV. KESIMPULAN

Pola hubungan politik civil society dan Pemerintahan Lokal dalam mendorong KIP di Kota Mataram dalam dimensi orientasi isu adalah kerjasama *collaburation*. Yaitu NGO melakukan asistensi teknis penyusunan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), mendorong pembahasan rancangan (*draft*) Perwal Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintahan Daerah Kota Mataram, hingga tindak lanjut terakhir adalah bersepakat untuk menjadikan Pemerintahan Kota Mataram sebagai proyek percontohan (*pilot project*) pelaksanaan Perwal Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Provinsi NTB. Dampak dari kegiatan NGO tersebut bagi pemerintah adalah implementasi Perwal Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Mataram. Penjelasan tentang agenda mempengaruhi pemerintahan tersebut menegaskan adanya pola kerjasama (*collaburation*) antara NGO dan Pemerintahan Kota Mataram dalam Mendorong KIP.

Dalam dimensi finansial, kegiatan NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram telah menunjukkan kejelasan sumber keuangan lembaga, menjaga kemandirian keuangan lembaga serta kejelasan alokasi keuangan lembaga. Indikator sumber keuangan lembaga NGO dalam mendorong KIP berdasarkan penilaian yaitu

2,76 (kategori tinggi). Begitu pula indikator kemandirian keuangan juga bernilai sama yaitu 2,76 (kategori tinggi). Artinya, secara finansial NGO menunjukkan kemandirian (*autonomy*) karena tidak tergantung dengan bantuan pendanaan dari pemerintah. Meskipun demikian, NGO dalam mendorong KIP seperti Fitra NTB dan Somasi NTB membuka peluang yang besar terhadap sumber pendanaan internasional seperti Australian AID, The Asia Foundation, TAF, Australian–Indonesia Program-Justice (AIPJ) bekerjasama dengan Somasi NTB.

Dalam dimensi kebijakan, pola hubungan politik civil society dan Pemerintah Lokal dalam mendorong KIP adalah *facilitation*. Dalam kegiatan mendorong KIP, NGO dan Pemerintahan Kota Mataram sama-sama menunjukkan strategi dan aktivitas kelembagaan masing-masing. NGO menunjukkan aktivitas kelembagaannya melalui kegiatan permohonan informasi, uji akses informasi, diseminasi hasil riset, dialog serta *tracking* calon anggota Komisi Informasi. Sedangkan Pemerintahan Kota Mataram menunjukkan aktivitasnya melalui pembentukan regulasi dalam bentuk Perwal Nomor 4 Tahun 2015 dan pembentukan Lembaga Komisi Informasi. Namun, dalam memfasilitasi gerakan NGO dalam mendorong KIP melalui Pembentukan PPID tersebut belum memberikan pelayanan informasi secara efektif kepada masyarakat karena pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat PPID belum memadai.

Dalam dimensi organisasional, pola hubungan politik civil society dan Pemerintah Lokal dalam mendorong KIP adalah *autonomy* (mandiri) dan *collabuation* (kerjasama). Untuk indikator interdependensi NGO dalam mendorong KIP mendapatkan nilai tinggi yaitu 2,84 yaitu tinggi. Hal tersebut ditegaskan oleh sebagian besar responden yaitu 23 orang (92%) menyatakan bahwa ada kerjasama atau interdependensi NGO dalam mendorong KIP. Kerjasama dalam mendorong KIP dilakukan secara bersama oleh NGO, media massa, Komisi Informasi, masyarakat dan Pemerintah Kota Mataram. Begitu pula untuk indikator independensi atau kemandirian NGO dalam mendorong KIP mendapatkan nilai tinggi yaitu 2,76. Hal tersebut menunjukkan adanya kemandirian NGO dalam mendorong KIP baik dalam kegiatan administratif, pengelolaan keuangan maupun program serta kegiatannya tidak ada campur tangan dari Pemerintahan Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ishiyama, Jhon T, dan Breuning, Marijke, 2013. 21<sup>st</sup> Century Political Science: A Reference Handbook. Terjemahan, Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu, Sebuah Referensi Panduan Tematis. Kencana Prenada Media grup; Jakarta
- [2] Nordolt, Henk Schulte. 2006. Politik Lokal di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- [3] Paulus, Wiratmo. 2001. *Membangun Masyarakat Adab; Suatu Sumbangan Sosiologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi Fisip Universitas Indonesia, 8 Juni 2001.
- [4] Kurniawan dan Puspitosari. 2012. *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*. Intrans Publishing; Malang
- [5] Madjid, Noercholis. 1996. Menuju Masyarakat Madani, dalam *Ulumul Qur'an*. Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, No. 2/VIII/1996
- [6] Muller, Karel B., *the Author. Journal compilation Political Studies*

*Association BJPIR, VOL 8, 311–3302006.*

- [7] Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- [8] Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

